

Judul : Otak-atik Gegabah
Tanggal : Rabu, 18 Januari 2023
Surat Kabar : Website DPR
Halaman : 10



PEKERJA menata tabung gas elpiji 3 kilogram di salah satu agen tabung gas di Jalan Cipamokolan, Rancasari, Kota Bandung, Selasa (17/1/2023). Pemerintah memberlakukan uji coba pembelian gas elpiji 3 kilogram menggunakan KTP di beberapa wilayah. Nantinya, pembelian hanya bisa dilakukan di subpenyalur resmi.

Otak-atik Gegabah Elpiji Bersubsidi

PEMERINTAH berencana memperbaiki sistem subsidi gas elpiji (liquefied petroleum gas/LPG) 3 kilogram pada tahun 2023 ini. Oleh karena itu, pembatasan pembelian gas melon itu tidak bisa ditunda-tunda lagi. Hal itu dimulai dengan kebijakan penjualan elpiji 3 kilogram yang hanya bisa dilakukan oleh penyalur resmi dari Pertamina.

ITU artinya, konsumen tidak bisa lagi membeli di warung-warung kecil. Pembeli nantinya wajib menyertakan kartu tanda penduduk (KTP) yang sudah terintegrasi dengan database Penyaluran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (PgKE) dan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

(Bersambung ke hal. 10 kol. 1)

Warga Terpencil Makin Susah Membeli Gas Melon

RENCANA pemerintah melarang warung-warung kecil menjual gas elpiji 3 kilogram dan penduduk menuai penolakan warga di sejumlah wilayah terpencil. Selain mematikan usaha penjualan elpiji skala kecil di kampung-kampung, warga juga di-

(Bersambung ke hal. 10 kol. 5)

Fakta larangan warung dan pengecer ditarang jual LPG 3 kilogram

- Pemerintah bakal melarang Penjualan gas LPG 3 kilogram di warung-warung kecil atau pengecer.

- Pembatasan dilakukan dalam rangka penyaluran subsidi tepat sasaran.

- Jika kebijakan ini sudah diterapkan, maka hanya pemilik NIK yang terdaftar dalam PSKE yang bisa membeli gas bersubsidi.



- Konsumsi elpiji bersubsidi (ukuran 3 kilogram) cenderung harus meningkat setiap tahun. Akibatnya, beban subsidi yang harus ditanggung pemerintah pun makin meningkat.

Distribusi Elpiji 3 kilogram (juta ton)



Berdasarkan data Pertamina, porsi penggunaan gas subsidi mencapai 93% per Januari 2022. Sementara, sisa 7% adalah penggunaan gas non-subsidi. Kenaikan terjadi akibat meningkatnya Contract Price Aramco (CPA) 21% dari harga rata-rata sepanjang 2021. Pada Februari, CPA mencapai 775 dolar AS per metrik ton.



HARGA GAS ELPIJI/ NONSUBSIDI

Per 27 Februari 2022

- Bandung
- Bekasi
- Tasikmalaya
- Bogor
- Kota Bogor
- Cianjur
- Garut
- Indramayu
- Karawang
- Sukabumi

5,5 kg Rp 88.000
12 kg Rp 187.000

Sebelumnya, harga gas elpiji sudah naik pada 25 Desember 2021. Merujuk laman Pertamina Delivery Service (PDS) pds.135.com, per 25 Desember 2021:

- Harga Bright Gas 5,5 kg (refill): Rp 76.000 per tabung
- Harga Bright Gas 5,5 kg (perdana): Rp 306.000 per tabung
- Harga Bright Gas 12 kg (refill): Rp 163.000 per tabung
- Harga Bright Gas 12 kg (perdana): Rp 513.000 per tabung
- Harga elpiji 12 kg (refill): Rp 163.000 per tabung
- Harga elpiji 12 kg (perdana): Rp 513.000 per tabung

Otak-atik Gegabah

(Sambungan dari hal. 1 kol. 3)

PT Pertamina (Persero) sebagai produsen mengatakan, pembelian gas melon dengan KTP dilakukan agar penyalurannya tepat sasaran dan menghindari penyalahgunaan elpiji tersebut. Oleh karena itu, orang yang bisa membeli elpiji 3 kilogram adalah yang sudah masuk dalam DTKS dan P3KE. Dalam database tersebut, mereka yang dianggap miskin dan selama ini menjadi sasaran penerima bantuan sosial berhak membeli gas melon.

Terdapat pula tiga jenis konsumen yang diperbolehkan menggunakan elpiji 3 kilogram, yaitu rumah tangga, usaha mikro, dan petani atau nelayan sasaran yang telah menerima pembagian paket konversi dari pemerintah.

Pembelian gas elpiji ini pun akan terekam dalam sistem informasi. Masyarakat yang sudah tercatat dapat langsung mendatangi penyalur resmi hanya dengan menunjukkan KTP.

Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga, Irto Ginting, menuturkan, program pembatasan pembelian LPG 3 kilogram dengan menggunakan KTP masih uji coba. Dia mengaku tidak bisa menentukan, kapan kebijakan itu akan diberlakukan.

Saat ini, uji coba dilakukan di lima kecamatan, dengan pencocokan data antara data pembeli dengan data P3KE dari pemerintah. Setelah pencocokan data, akan di-

evaluasi titik-titik verifikasi yang digunakan sebagai titik pembelian LPG 3 kilogram menggunakan KTP. Nantinya, masyarakat yang terdaftar dalam data P3KE hanya bisa membeli 3 kilogram di subpenyalur saja atau dinikmati pangkalannya.

Irto menambahkan, kebijakan ini akan ditetapkan oleh pemerintah dan hingga kini pihaknya masih berkoordinasi dengan pemerintah.

"Kebijakan ini tentu akan ditetapkan dari regulator. Kami masih terus koordinasi dengan regulator," ujarnya.

Menurut Irto, Pertamina terus menambah jumlah subpenyalur. Sepanjang 2022, misalnya, sudah ada lebih dari 20.000 subpenyalur elpiji 3 kilogram resmi di seluruh Indonesia. "Pertamina Patra Niaga telah melakukan implementasi penambahan subpenyalur," ujarnya, sebagaimana dilaporkan oleh kontributor "PR" Satrio Widianto.

Membengkak

Sebelumnya, Badan Anggaran (Bangar) DPR RI me-

mintakan pemerintah memperbaiki penyaluran gas bersubsidi. Hal itu seiring beban subsidi energi yang membengkak ke angka Rp 650 triliun pada tahun 2022. Ketua Bangar DPR RI Said Abdullah menyarankan pemerintah untuk menerapkan mekanisme subsidi semi tertutup kepada kelompok penerima manfaat ke depan.

"Salah satu yang perlu dipertimbangkan, misalnya, kelompok sasaran yang menerima subsidi LPG 3 kilogram memiliki akses *finger print* atau biometrik sehingga mekanisme penjualannya semi tertutup," katanya.

Sesuai evaluasi Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), sebanyak 32% rumah tangga dengan sosial ekonomi terendah hanya menikmati 22% alokasi anggaran subsidi LPG 3 kilogram. Sementara itu, sisanya 86% alokasi subsidi gas melon itu diperdagangkan secara bebas di pasaran.

"Dengan model penjualan seperti ini, justru terdapat 12,5 juta rumah tangga miskin dan rentan tidak menerima subsidi elpiji. Lebih jauh, sebanyak 2,7 juta kepala rumah tangga perempuan juga tidak menerima subsidi LPG," ujar Said.

Malah, dia menggarisbawahi, sebanyak 760 pe-nyandang disabilitas yang tidak mampu juga tidak menerima subsidi LPG 3 kilogram. Sesuai perhitungan TNP2K, sebanyak 4,06 juta kelompok masyarakat lanjut usia turut tidak bagian subsidi tersebut.

Institute for Development of Economics and Finance atau Indef menilai bahwa tidak tepatnya penyaluran subsidi elpiji, terutama elpiji 3, merupakan sepenuhnya kesalahan pemerintah karena tidak kunjung memberlakukan kebijakan subsidi tertutup.

Peneliti Indef Abra Talat-tov menjelaskan bahwa kondisi subsidi salah sasaran sudah terlihat sejak program konversi minyak tanah ke *liquefied petroleum gas* (LPG) pada 2007. Pemerintah memang menyediakan tabung 3 kilogram untuk masyarakat miskin, tetapi mekanismenya masih tetap terbuka.

"Siapa pun bisa membeli tabung elpiji *melor* atau 3 kilogram karena tidak terdapat larangan atau mekanisme khusus dalam distribusinya, hanya berupa imbauan bahwa tabung jenis itu untuk masyarakat miskin. Hingga saat ini, siapa pun tetap bebas membeli tabung ukuran

3 kilogram yang merupakan elpiji bersubsidi," ujar Abra.

Usaha warung

Pengamat kebijakan publik dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) Universitas Padjadjaran Asep Sumaryana berpendapat, kebijakan tersebut tidak mencerminkan keberpihakan pada rakyat kecil. Warung, sebagai salah satu manifestasi dari UMKM, menjadi salah satu pihak yang paling terdampak dari kebijakan ini.

Padahal, warung memperoleh keuntungan dari usahanya, di mana yang dicari adalah biaya produksi paling rendah, termasuk perputaran modal yang relatif cepat. Penjualan gas dianggap sebagai bagian dari hal tersebut karena putarannya sangat cepat dan biaya produksinya nihil meskipun lahannya tidak terlalu besar karena ada HET.

"Ketika mekanisme penjualan tersebut ditutup pemerintah, berarti keberpihakan pemerintah mulai bergeser ke pihak yang lebih *the have*. Padahal, kebijakan ini justru harus memberdayakan yang lemah agar dapat bersaing dan mandiri, bukan sebaliknya," tutur Asep, Selasa (17/1/2023).

Dikatakan Asep, distribusi melalui warung sebenarnya bisa tetap dilakukan dengan beberapa pengawasan. Hal itu dilakukan untuk mendukung penyaluran gas LPG dengan masyarakat miskin di pelosok, sambil warung tetap berdaya, sambil memastikan bahwa distribusinya tepat sasaran.

Menurut dia, urgensi dari pembinaan penyalur gas penting dilakukan. Penyalur dibagi secara berkelompok, mulai dari prosedur pengadaan gas serta teknik penjualannya, termasuk jaminan penghapusan tekanan dari pihak-pihak yang tidak berhak, tetapi memang ingin membeli elpiji 3 kilogram.

"Pembeli juga mesti mendapat pemahaman mengenai porsi atau hak pembelian gas elpiji," ujarnya.

Asep mengatakan, pengawasan sosial hingga saat ini agaknya belum berjalan baik akibat seringnya *cucuk pake* terhadap pihak-pihak luar yang mencampuri distribusi gas elpiji 3 kilogram sehingga akan sampai harga keekonomian.

"Jangan hilang. Kebijakan itu harus membuat masyarakat jadi tidak repot. Kalau kebijakan sekarang sudah baik ya di jaga. Jangan masyarakat dikorbankan. Kasihan karena kita tidak lagi energi yang ditawarkan ke masyarakat," katanya. (Endah Asih, Yulistiyne Kasumaningrum/PR)***

rakat mampu yang membeli gas elpiji 3 kilogram diperlakukan agar budaya mulai tumbuh," ujarnya.

Jangan gegabah

Akademisi dari Universitas Padjadjaran Yayan Satyakti mengatakan, pemerintah tidak boleh gegabah terkait aturan pembelian dan penjualan gas elpiji. Pemerintah harus menerapkan kebijakan tersebut.

Alasannya, gas elpiji merupakan salah satu diversifikasi energi yang ada di masyarakat. Di sisi lain, gas elpiji pun dinilai sebagai energi yang relatif paling nyaman bagi masyarakat.

"Kalau misalkan dicabut, maka pertanyaan apa? Ada tidak alternatifnya? Ini mau diganti dengan apa? Harus disediakan dulu, apa yang akan menjadi substitusinya. Untuk membangun kebiasaan agar masyarakat mau menggunakan energi tertentu, itu membutuhkan waktu, jangan gegabah," ujar Yayan, di Bandung, Selasa (17/1/2023).

Yayan mengemukakan, jika diteliti, keberadaan gas elpiji merupakan salah satu diversifikasi energi yang dimiliki Indonesia. Bahan mentahnya tersedia sehingga semestinya bisa digarap lebih serius karena merupakan peluang pasar. Apalagi, sistem gas pipanisasi perkotaan elpiji merupakan yang relatif paling nyaman bagi masyarakat.

Hanya, persolannya, lanjut Yayan, ada penugasan mengenai elpiji untuk masyarakat miskin. Sedangkan di-

lingkungan lain harus dipahami bahwa masyarakat merespons terhadap insentif. Dengan kata lain tentu masyarakat akan memilih yang lebih murah.

Dengan demikian, menurut Yayan, mestinya elpiji 3 kilogram terbagi dua, yakni yang bersubsidi dan nonsubsidi. Untuk yang bersubsidi, tidak diperjualbelikan secara bebas, tetapi hanya untuk distributor yang memegang lisensi untuk distribusi.

Sementara untuk yang nonsubsidi, secara perlahan-lahan subsidi dicabut, tetapi tetap dengan memperhatikan kemungkinan perkembangan harga yang ada. Ini berarti masyarakat sehingga akan sampai harga keekonomian.

"Jangan hilang. Kebijakan itu harus membuat masyarakat jadi tidak repot. Kalau kebijakan sekarang sudah baik ya di jaga. Jangan masyarakat dikorbankan. Kasihan karena kita tidak lagi energi yang ditawarkan ke masyarakat," katanya. (Endah Asih, Yulistiyne Kasumaningrum/PR)***



PEKERJA menata tabung elpiji subsidi 3 kilogram di gudang sebuah agen di Malang, Jawa Timur, Selasa (10/1/2023).*

Warga Terpencil

(Sambungan dari hal. 1 kol. 3)

pastikan kesulitan memperolehnya karena persoalan jarak dan biaya yang makin membengkak.

Hanya ada beberapa tabung elpiji 3 kilogram yang tergeletak di warung kecil milik Agus Supriyanta (23) di Kampung Citembong, Bandung Barat, Selasa (17/1/2023). Stok bahan bakar untuk memasak itu memang tak pernah banyak di warung Agus. Usahanya

sekadar untuk memenuhi kebutuhan para warga di kampungnya.

Dalam sepekan, ia cuma satu kali berbelanja elpiji 3 kilogram di kawasan Kecamatan Cipeundeuy yang berjarak sekitar 7 kilometer dari Citembong. Ia rata-rata hanya mengambil 4-8 tabung elpiji di gudang resmi Cipeundeuy yang nanti akan dijual kembali di kampungnya.

Namun, rencana pemerintah melarang warung kecil menjual elpiji 3 kilogram dan mengalihkan pembelian di agen/penyalur resmi meng-

gunakan rencana tersebut. Rencana itu otomatis mematikan usaha penjualan elpiji warga kecil.

Untuk wilayah terpencil seperti Citembong, rencana itu apabila terealisasi justru bakal menyulitkan warga yang selama ini mengand-

alkan pasokan elpiji dari warung-warung kampung. Warga dipastikan harus membeli langsung ke agen/penyalur atau pangkalan resmi di wilayah kecamatan yang berjarak sekitar 7 kilometer.

"Lebuheung nu gaduh motor. Ari teu gaduh motor, di jenging, piraku (Mending untuk beli langsung itu warungnya punya sepeda motor, kalau tidak, masak dijinjing dengan jarak sejauh itu)," kata Asep kepada "PR" di kampungnya, Selasa siang.

Jikapun memiliki motor, warga mesti merogoh kocek lebih dalam untuk membeli bensin guna membeli elpiji di penyalur resmi. Asep memperkirakan, perjalanan pulang pergi Citembong-Cipeundeuy menghabiskan 2 liter bensin. Tak cuma jarak tempuh yang jauh, perjalanan tersebut juga melintasi kawasan hutan dan perkebunan yang terbelah sepi.

Penolakan serupa disampaikan Karwati (38), pemilik warung kecil di Kampung Cibangkong, Desa Sumurhandung, Kecamatan Cipatat, KBB. Di kampungnya, Karwati juga menjual elpiji 3 kilogram bagi warga kampung. Cibangkong juga merupakan salah satu wilayah terpencil di Cipatat. Jaraknya cukup jauh dari Rajaman-dala, Cikalong, dan Padalarang.

Karwati bahkan memperoleh elpiji bukan dari agen atau pangkalan. Ia mendapatkannya dari toko-toko grosir sembako di kampung-kampung lain di wilayah Sumurhandung, seperti Singapura, Ciendog, dan Cipulus. Warga Cibangkong juga mengandalkan pasokan elpiji dari warung-warung kecil.

Karwati pun tak membeli banyak elpiji karena persoalan jarak serta ketiadaan agen resmi yang gampang dijang-

kani. Selain itu, kebutuhan warga yang membeli di warung-warga juga tak terlalu banyak.

Penolakan muncul pula dari warga selaku pembeli terkait rencana itu. Mak Uchil (60), misalnya, warga Kampung Ciangsi, Desa Sumurhandung juga mempersalahkan jarak yang jauh untuk membeli elpiji di penyalur resmi. "Mau beli ke Cipatat jauh, Padalarang dan Cikalong juga jauh," ucapnya.

Atrian penggunaan KTP pun dinilai bikin ribet warga. "Ribet, apalagi untuk warga yang sedang menggelar hajatan," kata Nenah (48), warga Kampung Cimangala, Desa Kertamukti, Kecamatan Cipatat.

Apabila rencana itu benar-benar diterapkan, Nenah juga harus mengeluarkan biaya ekstra untuk membeli elpiji agen resmi di Rajaman-dala menggunakan ojek. Jarak yang ditempuh diperkirakan mencapai 8 kilometer dengan ongkos ojek Rp 50.000 pergi pulang. Perjalanan demi memperoleh elpiji itu pun melalui jalan yang rusak di sekitar kampungnya.

"Bagusnya, penjualan elpiji seperti biasa saja, tak menggunakan aturan yang seperti itu," tuturnya.

Dulu pemerintah menerapkan aturan KTP dan la-rangan penjualan warung kecil adalah agar tak terjadi penyelewengan elpiji bersubsidi. Persoalannya, bagaimana nasib warga-warga di wilayah terpencil yang akses memperoleh elpiji dari penyalur resmi saja tak mudah karena jarak yang jauh dan hanya mengandalkan warung-warung kecil? (Bambang Arifanto/PR)***